JIAN : Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Vol. 23, No. 01 Juni 2026
e-ISSN: 2986-7444; p-ISSN: 2085-1804, Hal 374-384

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Dalam Perspektif SDGs 8 Di Kabupaten Probolinggo (Studi pada SPPG Desa Matekan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo)

Nurul Faizzah[1], Veronica Sri Astuti Niwangsih [2] Mastina Maksin[3]
Universitas Panca Marga
Email: Nurulfaizzah772@gmail.com, veronica@upm.ac.id, mastinamaksin@upm.ac.id

Abstract. *This study is motivated by the implementation of the Free Nutritious Meal Program (MBG) as a government policy that not only focuses on improving nutrition but also has the potential to promote economic growth through job creation. This research aims to analyze the implementation of the MBG program from the perspective of SDGs 8 (Decent Work and Economic Growth) at SPPG Desa Matekan, Besuk District, Probolinggo Regency. This study employs a qualitative descriptive method with data collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis is conducted using the policy implementation model of Van Meter and Van Horn, which includes policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication, characteristics of implementing agencies, social, economic, and political conditions, and implementer disposition. The results indicate that the implementation of the MBG program has generally been well executed and has contributed to job creation, increased community income, and strengthened the role of local MSMEs. The program demonstrates a clear linkage to the achievement of SDGs 8, particularly in promoting decent work and inclusive economic growth. However, several challenges remain, including variations in implementation quality, budget efficiency, and the emergence of perceived inequality across sectors, particularly in comparison to the welfare of educators.*
Keywords: *Policy Implementation, SDGs 8, Decent Work, Economic Growth.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada peningkatan gizi, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program MBG dalam perspektif *SDGs* 8 *(Decent Work and Economic Growth*) di SPPG Desa Matekan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik lembaga pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program MBG secara umum telah berjalan cukup baik dan memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan peran UMKM di tingkat lokal. Program ini terbukti memiliki keterkaitan dengan pencapaian *SDGs* 8, khususnya dalam aspek pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti variasi kualitas pelaksanaan, efisiensi pengelolaan anggaran, serta munculnya persepsi ketidakadilan antar sektor, terutama dibandingkan dengan kesejahteraan tenaga pendidik.
Kata kunci: *Implementasi Kebijakan, SDGs 8, Pekerjaan layak, Pertumbuhan Ekonomi.*

Received Feb 12, 2026; Revised March 22, 2026; Accepted may 29, 2026
* **Nurul Faizzah***: Email:* nurulfaizzah772@gmail.com

JIAN : Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Vol. 23, No. 01 Juni 2026
e-ISSN: 2986-7444; p-ISSN: 2085-1804, Hal 374-384

PENDAHULUAN

Pengangguran dan kekurangan gizi merupakan masalah global, menurut FAO (2023) 691-783 juta orang mengalami kelaparan pada 2022, ini menjauhkan dunia dari target *Zero Hunger* dalam *SDGs* 2. Gizi yang baik tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga produktivitas, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan (FAO, 2023).

Di Indonesia memiliki gagasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diatur dalam Perpres No. 83/2024 tentang Badan Gizi Nasional dengan bertujuan mengurangi stunting dan kekurangan gizi. Berdasarkan PP No. 17/2015, gizi adalah senyawa makanan esensial untuk pertumbuhan dan kesehatan manusia. Program ini menargetkan 20 juta penerima manfaat dan berpotensi menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru di sektor dapur dan 1 juta petani, nelayan, peternak, serta pelaku UMKM (Kementerian Sekretaris Negara, 2025).

Di Jawa Timur, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 3,61% pada Februari 2025, dengan 63,91% pekerja di sektor informal (BPS Jatim, 2025). Kabupaten Probolinggo mencatat 20.331 pengangguran (BPS Probolinggo, 2024), menghambat *SDGs* 8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Di Kecamatan Besuk, khususnya Desa Matekan, mayoritas masyarakat bergantung pada pertanian dengan upah buruh tani rendah Rp50.000 untuk setengah hari hal ini di bawah UMR Rp120.000/hari. Implementasi program MBG di Kecamatan Besuk terutama pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Matekan melibatkan beberapa tahap seperti pengadaan bahan pangan bergizi dari sumber lokal, sasaran distribusi berdasarkan kepada kelompok sasaran yang telah diatur Peraturan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi. Proses ini secara langsung menciptakan lapangan pekerjaan melalui kebutuhan tenaga kerja di bidang pertanian, logistik, dan layanan.

MBG mendukung *SDGs* 2 yaitu tanpa kelaparan dan *SDGs* 8, sejalan dengan UU No. 18/2012 tentang Pangan yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar secara adil dan berkelanjutan. Penelitian seperti Danira (2025) menunjukkan dampak jangka pendek pada pendapatan pertanian lokal, sementara Widyasari dkk. (2025) menyoroti kontribusi terhadap *SDGs* 2, 3, 4, dan 8. Namun, tantangan meliputi dasar hukum lemah, alokasi anggaran tidak merata, kualitas bahan pangan rendah, dan monitoring administratif (Basit & Ramadhani, 2025).

Penelitian terdahulu belum mengkaji MBG secara komprehensif dari perspektif *SDGs* 8. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif *SDGs* 8 di Kabupaten Probolinggo Studi pada SPPG Desa Matekan, Kecamatan Besuk, untuk memberikan rekomendasi kebijakan berkelanjutan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, di mana rumusan masalah dijadikan sebagai fokus utama untuk menggambarkan dan menjelaskan temuan yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian bersifat dinamis, artinya dapat berkembang seiring dengan proses pengumpulan data di lapangan (Sugiyono, 2011). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menghasilkan data berupa kata-kata atau narasi yang digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam serta mengembangkan pemaknaan berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Menurut Sugiyono (2005) dalam Nasution (2023), penelitian kualitatif digunakan untuk mengkaji objek dalam kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama.

Penelitian kualitatif berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, mengumpulkan serta mengevaluasi kualitas data, menganalisis, menafsirkan, hingga menarik kesimpulan dari temuan yang diperoleh. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi makna, karakteristik, serta memahami proses dan interaksi sosial yang terjadi dalam objek penelitian. Dengan menggunakan metode deskriptif, penelitian ini berupaya mengkaji individu, situasi, kondisi, serta sistem pemikiran yang berkembang dalam konteks kekinian secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari perspektif Sustainable Development Goals (SDGs) 8 mengenai Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi menggunakan teori Van Meter & Van Horn tentang model implementasi kebijakan publik yang meliputi 6 indikator utama.

Policy Standards and Objectives (Standar dan Tujuan Kebijakan).

Menurut Van Meter dan Van Horn 1975 (dalam Astuti dkk., 2022:4) bahwa "tolak ukur dari suksesnya sebuah kebijakan di implementasinya adalah dari tujuan bagaimana kebijakan itu dilahirkan". Kejelasan standar dan tujuan kebijakan menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan implementasi. Pada program MBG, tujuan telah dirumuskan secara jelas dalam pedoman Badan Gizi Nasional, mencakup:

a. **Tujuan pada Bidang Gizi**
   Memenuhi kebutuhan nutrisi bagi kelompok sasaran seperti anak usia prasekolah, peserta didik, santri, ibu hamil dan menyusui, serta balita. Selain itu, program ini bertujuan memperluas akses terhadap pangan bergizi bagi kelompok rentan serta mendorong terbentuknya pola konsumsi makanan yang sehat.
b. **Tujuan pada Bidang Pendidikan**
   Meningkatkan prestasi akademik, partisipasi, dan kehadiran peserta didik, sekaligus menekan angka putus sekolah. Program ini juga bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya gizi seimbang.
c. **Tujuan pada Bidang Ekonomi**
   Mengoptimalkan pemanfaatan sumber pangan lokal serta mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro dan kecil.
d. **Tujuan pada bidang Kemiskinan**
   Membuka peluang kerja dan membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dari tujuan tersebut program ini bersifat multidimensi ini menunjukkan bahwa MBG tidak hanya berorientasi pada gizi, tetapi juga untuk memberikan dampak yang lebih luas terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Dapat diketahui bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang menyusun pedoman teknis berperan sebagai acuan dalam pelaksanaan program, sehingga dapat meminimalisir potensi kegagalan implementasi.Keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi instrumen penting dalam mengarahkan pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Namun demikian, berdasarkan temuan di lapangan, masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian, khususnya terkait kualitas higienitas yang belum sepenuhnya optimal. Permasalahan tersebut dapat dikarenakan dengan keterbatasan pengalaman pelaksana, kapasitas sumber daya yang belum merata, serta mekanisme pengawasan yang masih memerlukan penguatan. Dengan demikian, meskipun kerangka standar dan tujuan kebijakan telah dirumuskan secara jelas, optimalisasi implementasi masih membutuhkan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan secara berkelanjutan.

***Policy Resource* (Sumber daya kebijakan).**

Menurut teori Van Meter & Van Horn (1975, dikutip Jumroh & Pratama, 2021:135), sumber daya kebijakan termasuk dana, tenaga kerja, serta sarana prasarana sama pentingnya dengan standar dan tujuan untuk kelancaran program. Pada implementasi MBG di Desa Matekan, ketiga aspek ini mendukung operasional secara efektif.

a. Dana

Dana menjadi faktor utama dalam mendukung pelaksanaan program MBG di Desa Matekan yang bersumber dari APBN melalui mekanisme Bantuan Pemerintah (Banper) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara atau Lembaga. Penyaluran dana dilakukan secara terpusat melalui *Virtual Account* ke rekening Kepala SPPG berdasarkan proposal yang diajukan setiap dua minggu. Pada tahap awal, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyalurkan dana sebesar Rp500.000.000 kepada SPPG sebagai modal operasional berdasarkan proposal tahunan.

Dalam implementasinya, alokasi anggaran dibagi berdasarkan kebutuhan per porsi sebesar Rp13.000-Rp15.000, yang mencakup biaya bahan pangan sebesar Rp8.000-Rp10.000, biaya operasional maksimal Rp3.000, serta biaya sewa maksimal Rp2.000. Skema ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran difokuskan pada pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat, sementara sisanya digunakan untuk mendukung operasional dan keberlanjutan program.

Selain itu, SPPG juga menerima insentif sebesar Rp6.000.000 per hari, yang dihitung berdasarkan asumsi 3.000 porsi dengan nilai Rp2.000 per porsi. Insentif ini diberikan selama 313 hari operasional dalam satu tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala SPPG, penyaluran anggaran umumnya berjalan tepat waktu, dengan sistem pelaporan keuangan yang dilakukan secara berkala. Mekanisme pembayaran kepada pelaku UMKM yang relatif cepat juga menunjukkan adanya upaya menjaga kelancaran rantai pasok lokal.

Namun demikian, skema insentif yang didasarkan pada asumsi tetap sebesar 3.000 porsi per hari menunjukkan adanya pendekatan yang bersifat seragam. Dalam praktiknya, jumlah penerima manfaat di lapangan dapat mengalami variasi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan kebutuhan riil. Selain itu, besaran

insentif sebesar Rp6.000.000 per hari memerlukan pengawasan yang konsisten agar tetap selaras dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pengelolaan anggaran telah dirancang secara terstruktur dan menunjukkan indikasi transparansi, masih diperlukan penguatan dalam aspek fleksibilitas perencanaan dan pengawasan. Dengan demikian, optimalisasi pengelolaan sumber daya keuangan tidak hanya bergantung pada ketepatan penyaluran, tetapi juga pada kemampuan menyesuaikan alokasi dengan dinamika kebutuhan di lapangan.

b. Tenaga Kerja

Dalam implementasi program MBG di SPPG Desa Matekan, sumber daya manusia menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil penelitian, program ini melibatkan sebanyak 51 tenaga kerja lokal, termasuk perempuan dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan bahan pangan. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa program tidak hanya berfungsi sebagai intervensi gizi, tetapi juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja. Pada aspek sumber daya manusia, ketersediaan tenaga kerja yang memadai disertai pelatihan awal dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan mencerminkan kesiapan institusional dalam menjalankan program. Selain itu, keterlibatan pemuda dari keluarga kurang mampu menunjukkan adanya dimensi inklusivitas sosial yang berkontribusi pada pengurangan pengangguran. Hal itu menunjukan adanya keterkaitan dengan *SDGs* 8.

c. Sarana dan prasarana

Pada aspek sarana dan prasarana meskipun fasilitas dasar telah tersedia, masih ditemukan keterbatasan pada kapasitas penyimpanan dan pengelolaan limbah. Hal ini menunjukkan bahwa kecukupan sumber daya belum sepenuhnya diikuti oleh kualitas pengelolaan yang optimal. Oleh karena itu, penguatan pada aspek pemeliharaan dan peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi penting untuk menjamin keberlanjutan program.

Secara keseluruhan, ketersediaan sumber daya dalam implementasi program MBG di Desa Matekan telah menunjukkan dukungan yang cukup memadai, baik dari sisi pendanaan, sumber daya manusia, maupun sarana prasarana. Hal ini tercermin dari sistem penyaluran anggaran yang terstruktur, keterlibatan tenaga kerja lokal, serta mekanisme pelaporan keuangan yang berjalan secara berkala.

Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan, khususnya dalam penyesuaian alokasi anggaran dengan kondisi nyata di lapangan serta peningkatan efektivitas pengawasan. Skema anggaran yang bersifat seragam dan berbasis asumsi menunjukkan perlunya fleksibilitas dalam implementasi agar lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan.

Dengan demikian, meskipun sumber daya secara umum telah mendukung pelaksanaan program, optimalisasi dalam pengelolaan dan pengawasan menjadi kunci untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas kebijakan dapat tercapai secara berkelanjutan.

JIAN : Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Vol. 23, No. 01 Juni 2026
e-ISSN: 2986-7444; p-ISSN: 2085-1804, Hal 374-384

Inter organizational communication and enforcement activities **(Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Penegakan).**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, standar dan tujuan kebijakan memiliki peran penting dalam keberlangsungan program MBG. Namun, pencapaian standar dan tujuan tersebut juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi antar pelaksana. Dalam teori Van Meter dan Van Horn (1975) yang dikutip oleh Jumroh dan Pratama (2021:137), ditegaskan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan standar dan tujuan, tetapi juga oleh kualitas komunikasi antar aktor kebijakan.

Dalam pelaksanaan program MBG, proses komunikasi berlangsung secara hierarkis mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN) hingga tingkat SPPG, yang menunjukkan adanya alur koordinasi yang jelas. Penyampaian informasi juga memanfaatkan teknologi seperti WhatsApp, yang mendukung efisiensi dalam distribusi informasi yang dibutuhkan selama pelaksanaan program. Mekanisme ini membantu memperjelas standar kebijakan serta indikator kinerja, sejalan dengan teori implementasi yang menekankan pentingnya koordinasi vertikal untuk meminimalisir ambiguitas.

Komunikasi dengan mitra eksternal, seperti pelaku UMKM (misalnya Ibu Rinda dari *Rins Kitchen*), juga berjalan dengan baik melalui kesepakatan awal terkait jumlah pesanan dan harga. Hal ini menciptakan hubungan kerja yang harmonis tanpa kendala berarti, sekaligus memperkuat rantai pasok lokal dan mendukung stabilitas ekonomi.

Selain itu, komunikasi dengan pihak sekolah sebagai penerima manfaat diawali dengan proses sosialisasi oleh SPPG, kemudian dilanjutkan dengan persetujuan formal melalui surat bermaterai. Proses ini menunjukkan adanya tata kelola yang terstruktur. Umpan balik dua arah juga berjalan efektif, misalnya melalui laporan sekolah terkait kekurangan menu yang kemudian dijadikan bahan evaluasi, sehingga memungkinkan adanya penyesuaian dan peningkatan kualitas layanan secara cepat. Secara keseluruhan, pola komunikasi yang terbangun tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga adaptif, dengan dukungan teknologi digital yang mempercepat respons dan meminimalisir distorsi informasi.

Komunikasi antar organisasi yang efektif tersebut turut mendukung pencapaian *SDGs* 8, khususnya target 8.3 melalui pemberdayaan UMKM dan wirausaha, target 8.5 dalam penyediaan pekerjaan yang layak.

Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi seperti WhatsApp, di satu sisi mampu meningkatkan efisiensi komunikasi, namun disisi lain juga memiliki keterbatasan, seperti potensi miskomunikasi serta ketergantungan pada stabilitas jaringan internet.

Characteristics of the implementing agencies **(Karakteristik Lembaga Pelaksana)**

Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn (1975) yang dikutip oleh Jumroh dan Pratama (2021:140), pelaksana kebijakan yang memahami prosedur implementasi belum tentu mampu menjalankan kebijakan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh potensi munculnya konflik atau ketidakharmonisan dalam struktur organisasi, sehingga diperlukan hubungan kerja sama yang solid antar pelaksana kebijakan.

Karakteristik lembaga SPPG Desa Matekan yang terstruktur, profesional, dan berorientasi pada masyarakat memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini terlihat dari pembagian tugas yang jelas antar divisi serta adanya koordinasi yang terarah, dengan kepala SPPG sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam persetujuan keuangan.

Selain itu, berdasarkan perspektif pelaku UMKM sekaligus orang tua penerima manfaat, kualitas layanan MBG di Desa Matekan dinilai lebih baik dibandingkan dengan dapur MBG di lokasi lain. Penilaian ini menunjukkan bahwa SPPG Desa Matekan memiliki keunggulan dalam pengelolaan program, kualitas layanan, serta respons terhadap umpan balik dari masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga memperhatikan tingkat kepuasan penerima manfaat.

Dari sisi ekonomi, program ini turut menciptakan peluang kerja yang lebih terstruktur melalui keterlibatan relawan dengan pembagian tugas dan jam kerja yang jelas, serta partisipasi pelaku UMKM seperti Ibu Rinda dalam rantai pasok makanan. Keterlibatan ini mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus mendukung terciptanya pekerjaan yang layak bagi masyarakat, termasuk perempuan dan keluarga pekerja.

Dengan demikian, karakteristik kelembagaan SPPG tidak hanya mendukung efektivitas implementasi kebijakan, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian *SDGs* 8 melalui integrasi antara pemenuhan gizi, penciptaan lapangan kerja berkelanjutan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Matekan

***Economic, social and political conditions* (Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik).**

Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn (1975) yang dikutip oleh Jumroh dan Pratama (2021:141), kondisi sosial, ekonomi, dan politik memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Matekan, kondisi ekonomi memberikan kontribusi nyata melalui penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, baik sebagai relawan maupun pelaku UMKM. Program ini menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat, seperti ibu rumah tangga yang memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan kebutuhan rumah tangga. Selain itu, keterlibatan UMKM, seperti usaha kuliner lokal, mengalami peningkatan permintaan hingga ribuan porsi, yang berdampak pada penambahan tenaga kerja serta penguatan rantai pasok ekonomi lokal. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan yang bersifat inklusif serta meningkatnya daya beli masyarakat.

Dari aspek sosial, meskipun pada awalnya terdapat perbedaan pandangan yang dipengaruhi oleh preferensi politik, mayoritas masyarakat kini menunjukkan penerimaan yang positif terhadap program. Partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan sebagai bahan evaluasi mencerminkan adanya proses adaptasi sosial yang mendukung keberlanjutan program. Namun demikian, implementasi program juga memunculkan perubahan perilaku pada peserta didik, di mana fokus belajar cenderung bergeser pada waktu pembagian makanan, terutama ketika terjadi keterlambatan distribusi. Hal ini berdampak pada menurunnya konsentrasi dalam proses pembelajaran.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program MBG belum sepenuhnya terintegrasi dengan jadwal akademik di sekolah. Keterlambatan distribusi menjadi kendala teknis yang berdampak langsung pada efektivitas pembelajaran, sehingga diperlukan penyesuaian agar pelaksanaan program tetap selaras dengan tujuan pendidikan.

Dari sisi politik, implementasi program didukung oleh sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam penetapan standar kualitas, kebersihan, serta prosedur pelaksanaan. Program ini juga merupakan bagian dari agenda kebijakan nasional yang kemudian diimplementasikan di tingkat lokal. Meskipun terdapat perbedaan pandangan politik di masyarakat, hal tersebut tidak menghambat jalannya program.

Namun demikian, kuatnya dorongan politik dalam pelaksanaan program juga perlu menjadi perhatian, karena berpotensi memunculkan ketidakseimbangan dalam prioritas kebijakan. Program yang berangkat dari agenda politik cenderung memperoleh percepatan implementasi dibandingkan sektor lain yang juga memiliki urgensi tinggi, seperti pendidikan. Hal ini tercermin dari munculnya persepsi ketimpangan kesejahteraan antara pelaksana program MBG dan profesi lain, seperti guru honorer, yang dapat mempengaruhi persepsi keadilan dalam kebijakan publik.

Dalam kaitannya dengan *SDGs* 8, implementasi program MBG telah berkontribusi pada penciptaan pekerjaan produktif bagi kelompok rentan, termasuk pemuda dan perempuan (target 8.5), pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari rantai ekonomi lokal (target 8.3), serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan aspek gizi masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

The disposition of implementation (Disposisi Pelaksana)

Disposisi pelaksana dalam implementasi Program MBG di SPPG Desa Matekan menunjukkan bahwa kinerjanya belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.

Dari sisi internal, semangat kerja pelaksana secara umum tergolong baik, terutama karena adanya manfaat ekonomi yang dirasakan secara langsung. Namun demikian, terdapat perbedaan tingkat motivasi kerja yang dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan di masing-masing divisi. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki peran penting dalam memperkuat atau melemahkan disposisi pelaksana. Dari sisi penerima manfaat masyarakat memberikan respons ada yang menerima dan juga penolakan terhadap program yang dipengaruhi oleh perbedaan pandangan. Dari perspektif stakeholder, seperti pihak sekolah, sikap yang ditunjukkan tidak sepenuhnya seragam. Sebagian pihak mendukung, sementara sebagian lainnya belum sepenuhnya menerima program. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat dukungan tidak hanya ditentukan oleh individu, tetapi juga oleh dinamika kelembagaan.

Meskipun secara umum disposisi pelaksana dan penerimaan masyarakat cenderung positif, terdapat isu keadilan kebijakan yang perlu menjadi perhatian. Program MBG memberikan tambahan pendapatan bagi pelaksana dengan kisaran insentif harian antara

Rp100.000 hingga Rp150.000. Di sisi lain, kondisi ini memunculkan perbandingan dengan kesejahteraan guru honorer yang telah lama mengabdi namun masih menghadapi keterbatasan penghasilan dan ketidakpastian status.

Kondisi tersebut menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan tenaga pendidik, sebagaimana terungkap dalam hasil wawancara, di mana program yang relatif baru dinilai lebih tinggi dalam memberikan insentif dibandingkan profesi guru yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Meskipun tidak secara langsung menurunkan motivasi kerja guru, munculnya kecemburuan sosial menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya mempertimbangkan dampak lintas sektor. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini berpotensi mempengaruhi persepsi keadilan serta legitimasi kebijakan dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, berdasarkan seluruh indikator yang telah dianalisis, implementasi program MBG menunjukkan kontribusi terhadap pencapaian SDGs 8, khususnya dalam penciptaan pekerjaan layak, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM. Program ini mampu membuka peluang kerja bagi pemuda, perempuan, dan kelompok berpenghasilan rendah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.

Namun demikian, capaian tersebut tidak terlepas dari sejumlah catatan kritis. Salah satu isu yang muncul adalah potensi ketidakseimbangan dalam alokasi anggaran yang dapat mempengaruhi sektor lain yang juga memiliki urgensi tinggi, seperti pendidikan. Kondisi ini memunculkan persepsi ketimpangan dalam prioritas kebijakan, terutama jika dibandingkan dengan kesejahteraan profesi lain seperti guru honorer.

Selain itu, meskipun program secara umum diterima dengan baik, masih terdapat sejumlah kritik yang muncul, baik terkait aspek keadilan, komunikasi, maupun latar belakang politik kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya diukur dari capaian ekonomi, tetapi juga dari kemampuan kebijakan dalam mewujudkan keadilan sosial serta menjaga keseimbangan antara sektor pembangunan.

KESIMPULAN

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Desa Matekan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, menunjukkan bahwa standar dan tujuan kebijakan telah dirumuskan secara jelas, namun dalam pelaksanaan program tersebut masih menghadapi kendala pada aspek higienitas yang memerlukan pengawasan lebih ketat. Sumber daya program secara umum tersedia, tetapi besarnya alokasi anggaran serta keterbatasan fasilitas operasional menimbulkan potensi inefisiensi apabila tidak diawasi dengan baik. Komunikasi antar lembaga dan karakteristik lembaga pelaksana tergolong terstruktur, namun kondisi ekonomi, sosial, dan politik di lapangan menunjukkan adanya dinamika, termasuk perubahan perilaku siswa serta pengaruh kepentingan politik terhadap persepsi masyarakat. Disposisi pelaksana secara umum mendukung keberlangsungan program, tetapi masih diwarnai kesenjangan motivasi dan persepsi ketidakadilan, khususnya yang dirasakan oleh guru honorer dibandingkan pelaksana MBG.

Dari sisi keterkaitan dengan *SDGs* 8 (*Decent Work and Economic Growth*), program ini memberikan kontribusi terhadap sebagian target, seperti penciptaan lapangan kerja dan

keterlibatan UMKM, tetapi belum menjangkau seluruh dimensi pekerjaan layak secara merata, terutama terkait keadilan antar sektor dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan demikian, implementasi MBG di Desa Matekan tidak dapat disimpulkan sepenuhnya berhasil atau gagal, melainkan menunjukkan capaian pada aspek tertentu yang berjalan beriringan dengan persoalan yang dihadapi.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas dan efisiensi program, termasuk mengkaji keterkaitannya dengan sektor pendidikan agar tidak menimbulkan ketimpangan prioritas pembangunan. SPPG Desa Matekan perlu memperbaiki kualitas infrastruktur, khususnya peralatan penyimpanan dan pengelolaan limbah, serta memperkuat manajemen internal dan pelatihan SDM secara berkelanjutan. Adapun penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih lanjut dampak MBG terhadap sektor lain serta aspek keadilan kebijakan dan distribusi anggaran secara lintas sektor, sehingga hasil evaluasi kebijakan ke depan dapat lebih komprehensif dan objektif.

Referensi

Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). Teori dan Analisis Kebijakan Publik (1st ed.). ALFABETA.

Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). Tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia: konsep, target, dan strategi implementasi. Unpad Press.

Dewi, D. S. K. (2022). KEBIJAKAN PUBLIK Proses, Implementasi dan Evaluasi (1st ed.). Penerbit Samudra Biru.

Hayat. (2018). Kebijakan publik: evaluasi, reformasi dan formulasi. Intrans Publishing.

Igirisa, I. (2022). KEBIJAKAN PUBLIK Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris (1st ed.). Tanah Air Beta.

Jumroh, & Pratama, Y. J. (2021). Implementasi Pelayanan Publik: Teori dan Praktik. INSAN CENDEKIA MANDIRI.

Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. CV. Harfa Creative.

Rahman, B. (2007). Pengantar metodologi penelitian. eLKAF.

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. ALFABETA.

Wahyudi, Avianti, W., Martin, A., Jumali, Andriyani, N., Prihatiningsih, D., Misesani, D., Fahrudin, Yufrinalis, M., Angelina, M., Mbari, F., Ningsih, A. G., Yulianto, A., Rokhman, M. T. N., Haqiyah, A., & Sukwika, T. (2023). Metode Penelitian (Dasar Praktik dan Penerapan Berbasis ICT). PT. Mifandi Mandiri Digital

Basit, M., & Ramadani, H. (2025, Juni). Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Perkembangan Ekonomi. Journal of Economics Development Research, 1.

Danira, O. (2025). Exploring the potential economic impact of Indonesia's free school meal program. International Education & Research Journal (IERJ), 11(3), 97–99.

Nissa, A. K., Candra, M., Humairoh, T., & Gusyuliandari, S. (2025, Juni). Kebijakan Makanan Bergizi Gratis: Analisis Ekonomi Politik dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus: SMP Negeri 4 Tanjungpinang. : Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, 2. https://doi.org/10.5281/zenodo.15521260

Rassanjani, S., & Rahmi, I. (2025). FREE SCHOOL MEALS POLICY: LESSONS LEARNED FROM AROUND THE WORLD FOR INDONESIA. Jurnal Ilmu Sosial, 24.

Sari, N. H., Lionardo, A., Thamrin, M. H., & Putra, R. (2025, oktober Jumat). Free School Meals Policy as a Learning Framework for MBG in Indonesia: A Systematic Literature Review. Journal of Universal Studies, 5.

Widyasari, S. Y., Larasati, A., & Alam, W. Y. (2025). Evaluasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar: Implikasi Terhadap Kesehatan Anak dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal. Journal Of Social Science Research.

Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. (2024). Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Badan Gizi Nasional. (2024). Pedoman umum sistem dan tata kelola Badan Gizi Nasional untuk program makan bergizi gratis.

Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Indonesia. (2024). Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2025). Februari 2025: Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 3,61 persen di Jawa Timur. https://jatim.bps.go.id/

Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo. (2024). Statistik kunci Kabupaten Probolinggo 2022-2024. https://probolinggokab.bps.go.id/id/statistics

Badan Gizi Nasional. (2024). Pedoman umum sistem dan tata kelola Badan Gizi Nasional untuk program makan bergizi gratis.

.FAO, IFAD, UNICEF, WFP, & WHO. (2023). The State of Food Security and Nutrition in the World 2023: Urbanization, agrifood systems transformation and healthy diets across the rural–urban continuum. https://www.fao.org

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025). Program makan bergizi gratis sentuh 20 juta penerima, ciptakan 290 ribu lapangan kerja. https://www.setneg.go.id

United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. https://sdgs.un.org

United Nations. (2016). The Sustainable Development Goals Report 2016. https://unstats.un.org/sdgs/report/2016